

**STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK  
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA**

Felia De Laura Tawalujan  
NPP. 31.0885

*Asdaf Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara  
Program Studi: Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email: [feliadelaura08@gmail.com](mailto:feliadelaura08@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Rully Sumual, S.Pd., M.AP.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Population density is increasing because the human population continues to grow. Due to its large population, there has also been a fairly large increase in population in North Minahasa district compared to the last few years. A very high growth rate is a demographic problem that can affect many aspects of life, namely economic, social and educational aspects. **Purpose:** The aim of this research is to describe the Population Control and Family Planning Department's strategy which is expected to be able to reduce the rate of population growth in North Minahasa and identify the obstacles in implementing the Family Planning program in suppressing the rate of population growth in North Minahasa. **Method:** This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** The results of the research show that the Population Control and Family Planning Service has developed a strategy in the form of a program, namely the Family Planning Program and then implemented it which is running quite well even though there are various factors that hinder the implementation of this program, such as human resources and budget availability. **Conclusion:** Research finds that internal factors (such as legal basis and support from honorary staff) as well as external factors (such as family planning programs and geographical challenges) influence population growth. Priority strategies involve optimizing family planning programs, increasing capacity and cooperation, as well as motivating and training human resources. It is hoped that this strategy will increase the effectiveness of the family planning program. Suggestions include maximizing internal strengths, improving infrastructure, increasing employee commitment, optimizing external opportunities, as well as regular evaluation and training.

**Keywords:** Family Planning Program, Strategy, Population Growth Rate

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kepadatan penduduk semakin meningkat karena populasi manusia yang terus berkembang. Karena jumlah penduduknya yang besar, begitu juga dengan peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar di kabupaten Minahasa Utara yang telah terjadi jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi merupakan masalah demografi yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial dan juga pendidikan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Strategi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Minahasa Utara dan mengetahui penghambat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Minahasa Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah strategi dalam bentuk program yaitu Program KB kemudian mengimplementasikannya yang berjalan dengan cukup baik meskipun ada berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan program ini seperti sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. **Kesimpulan:** Penelitian menemukan bahwa faktor internal (seperti dasar hukum dan dukungan tenaga honorer) serta faktor eksternal (seperti program KB dan tantangan geografis) mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Strategi prioritas melibatkan pengoptimalan program KB, peningkatan kapasitas dan kerjasama, serta motivasi dan pelatihan SDM. Diharapkan strategi ini akan meningkatkan efektivitas program KB. Saran termasuk pemaksimalan kekuatan internal, perbaikan infrastruktur, peningkatan komitmen pegawai, optimalisasi peluang eksternal, serta evaluasi dan pelatihan berkala.

**Kata kunci:** *Laju Pertumbuhan Penduduk, Program Keluarga Berencana, Strategi*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat rentan terhadap dampak krisis populasi global. Kepadatan penduduk semakin meningkat karena populasi manusia yang terus berkembang. Karena jumlah penduduknya yang besar, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam bidang dinamika kependudukan (Amelinda & Haryani, 2023). Namun, negara-negara berkembang seperti Malaysia dan Thailand juga mengkhawatirkan pertumbuhan populasi mereka yang pesat. Tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi merupakan masalah demografi yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial dan juga pendidikan (Adiwilaga & Alfian, 2021).

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, semakin sulit bagi pemerintah untuk mengontrol dan menyediakan berbagai layanan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin sulit dilakukan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dengan kata lain, tiga variabel kunci yang menentukan apakah suatu populasi bertambah atau berkurang adalah migrasi, kesuburan, dan kelahiran (Firmansyah & Anisykurlillah, 2023).

Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa menurut data BPS Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan statistik BPS, terdapat 223.009 jiwa penduduk yang tinggal di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara, 2021). Peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar telah terjadi jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk terlihat jelas dari angka-angka tersebut yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah penduduk Indonesia. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memperburuk kemiskinan.

Kemiskinan, memburuknya kondisi sosial, dan meningkatnya angka pengangguran hanyalah beberapa dari permasalahan kependudukan yang dikhawatirkan pemerintah akan muncul akibat laju pertumbuhan penduduk saat ini. Permasalahan ini, pada gilirannya, diyakini menginspirasi perilaku



kriminal, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempersulit keluarga untuk sejahtera (Lubis & Zubaidah, 2020). Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai unsur pelaksana pemerintah kota dalam bidang pengendalian, pemerintah telah membentuk kebijakan program Keluarga Berencana untuk memperlambat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat (Dinas PKKKB Minahasa Utara, 2023). Tujuan program ini adalah membantu pemerintah mencapai kesejahteraan ekonomi, spiritual, sosial, dan budaya. topik seperti dinamika populasi dan strategi reproduksi. Pembentukan keluarga berkualitas, pencegahan perkawinan anak, penurunan jumlah penduduk, dan pemeliharaan rasio penduduk terhadap kebutuhan yang sehat merupakan tujuan penting dari program keluarga berencana di Indonesia. Kesejahteraan setiap individu dan keluarga adalah tujuan utama program keluarga berencana (BKKBN, 2023)

Pemerintah Minahasa Utara, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, harus menerapkan langkah-langkah untuk mengekang pertumbuhan penduduk jika ingin meningkatkan kesejahteraan warganya dan meningkatkan perekonomian daerah. Untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk yang cepat, salah satu solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan meningkatkan inisiatif Keluarga Berencana (KB). Dengan mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui Kementerian BKKBN, keluarga berencana membantu ibu dan anak hidup lebih sehat; tujuannya agar orang tua mampu memberikan nafkah yang cukup bagi anak-anaknya dan masyarakat secara keseluruhan. Rata-rata keluarga Brasil memiliki dua anak. Kepala BKKBN mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Peraturan 72/PER/B5/2011 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja. prosedur badan tersebut.

Sebagai bagian dari upaya menekan pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerapkan kebijakan program Keluarga Berencana yang mendorong penggunaan alat kontrasepsi di kalangan peserta program.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan masalah laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara. Tabel berikut merupakan pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara.

**Tabel 1. 1**  
**Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara**

| No | Kecamatan | Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk Per (Tahun 2021- 2023) (%) |
|----|-----------|----------|--|
| 1. | Kema      | 18,095   | 1,79   |
| 2. | Kauditan  | 29,297   | 2,26   |
| 3. | Airmadidi | 31,446   | 1,49   |
| 4. | Kalawat   | 33,623   | 2,53   |
| 5. | Dimembe   | 28,169   | 2,21   |

|        |                  |              |      |
|--------|------------------|--------------|------|
| 6.     | Talawaan         | 23,063       | 3,10 |
| 7.     | Wori             | 21,015       | 1,27 |
| 8.     | Likupang Barat   | 17,943       | 0,40 |
| 9.     | Likupang Timur   | 20,868       | 2,56 |
| 10.    | Likupang Selatan | 5,849        | 0,94 |
| Jumlah |                  | 229.368 Jiwa | 1,93 |

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara, 2023)

Berdasarkan Jumlah Penduduk pada Tabel 1.1 Jumlah penduduk di Minahasa Utara tersebar pada 10 Kecamatan yaitu Kec. Kema, Kec. Kauditan, Kec. Airmadidi, Kec. Kalawat, Kec. Dimembe, Kec. Talawaan, Kec. Wori, Kec. Likupang Barat, Kec. Likupang Timur dan Kec. Likupang Selatan, Kecamatan yang paling tinggi penduduk yaitu Kec. Kalawat sebesar 33,623 jiwa, serta Kec. Airmadidi sebesar 31,446 jiwa, sedangkan penduduk yang paling rendah adalah Kecamatan Likupang Selatan sebesar 5,849 jiwa. Berdasarkan Laju Pertumbuhan Penduduk Per (Tahun 2020- 2022) (%), Laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi adalah Kec. Talawaan sebesar 3,10 % dan Kec. Likupang Timur = 2, 56 % serta Kec. Kalawat sebesar 2,53 persen, Kec Kauditan 2,26 %, Kec Dimembe 2,21 %. Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa laju pertumbuhan penduduk masih tinggi (diatas 2 %) dan 3 % pertahun. Tabel berikutnya menampilkan jumlah penduduk yang menggunakan KB dan kontrasepsi di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2019 hingga tahun 2021.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Peserta KB Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi di Kabupaten Minahasa Utara (Jiwa)**  
**Tahun 2021 – 2023**

| NO     | JENIS ALAT | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 1.     | IUD        | 695        | 682        | 1.024      |
| 2.     | Suntik     | 19.056     | 18.065     | 10.019     |
| 3.     | Kondom     | 495        | 548        | 32         |
| 4.     | Implen     | 7.173      | 6.909      | 3.355      |
| 5.     | Pil        | 6.983      | 6.814      | 2.820      |
| 6.     | MOW        | 560        | 639        | 552        |
| 7.     | MOP        | 21         | 25         | 22         |
| Jumlah |            | 35.673     | 35.673     | 17.416     |

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2023)

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Penelitian Abdurrahman, M. Taufik Rachman, dan Dara Puspita Ayu yang berjudul " Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram" hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota mataram sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi atau program yang



dilaksanakan (Abdurrahman et al., 2019). Penelitian Rusma Ayu R, Ramlan, dan Ayu Dwi Putri Rusman yang berjudul “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Guna Mewujudkan Keluarga Kecil Mandiri Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare” hasil penelitian menunjukkan bahwa, efektifitas program Kampung KB guna mewujudkan keluarga kecil mandiri di Kelurahan Labbukang Kota Parepare ditemukan bahwa Pemahaman program Kampung KB belum efektif, Ketepatan sasaran program Kampung KB efektif, Ketepatan waktu pelaksanaan program Kampung KB efektif, pencapaian tujuan program Kampung KB belum efektif, dan perubahan nyata sudah efektif (R. Rusma et al., 2020). Penelitian Gladies N.F. Gerits, Sarah Sambiran, dan Stefanus Sampe yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Bitung Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Matuari (Studi Di Dinas Pengendalian Dan Keluarga Berencana Kota Bitung )”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendekatan yang dilakukan pemerintah kota Bitung terhadap program pengendalian jumlah penduduk adalah dengan melaksanakan program peningkatan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana, melaksanakan program peningkatan kesejahteraan keluarga, dan memantau masyarakat yang melakukan urbanisasi (Gerits et al., 2022). Penelitian Delfi Heni Susanti, Rumzi Samin, dan Okparizan yang berjudul “Evaluasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Pada Balita di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang” hasil penelitian menunjukkan bahwa, program gizi buruk sudah cukup efektif namun belum optimal pelaksanaannya. Saran sebagai upaya perbaikan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program, mengupayakan pemenuhan pemberian makanan tambahan bagi semua balita, pemenuhan pelatihan progam, penambahan petugas dan meningkatkan pelatihan (Susanti et al., 2023). Terakhir, penelitian Desrita Sari dan Hasim As’ari yang berjudul “Evaluasi Strategi Pengendalian Penduduk di Kota Pekanbaru” hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi ini Dari semua indicator evaluasi strategi, bisa dikatakan strategi ini berhasil, karna bisa dilihat dari cara kerja serta hasil dari program strategi pengendalian penduduk tersebut. Dalam menjalankan startegi terdapat kendala yang dihadapi seperti kurang sumber daya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat (Sari & As, 2023).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan teori analisi Strategi SWOT menurut Freddy Rangkuti yang terdiri dari empat dimensi yaitu, Kekuatan (*Strenght*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*), dan Ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 2008).

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Minahasa Utara dan mengetahui penghambat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Minahasa Utara

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau feinomeina dan

keinyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangungsong (Simangungsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sebelas informan yang terdiri dari, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Seksi sebanyak dua orang, dan Masyarakat sebanyak lima orang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Analisis Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara**

##### **3.1.1. Kekuatan (*Strength*)**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui perencanaan kebijakan dan program strategis. Salah satu inisiatif utama adalah Program Keluarga Berencana (KB), yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini melibatkan penggunaan berbagai metode kontrasepsi seperti pil KB, implan, suntikan, IUD, MOW, dan kondom, serta mencakup partisipasi baik dari perempuan maupun laki-laki.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Dr. Jane M.S. Symons, M.Kes, menunjukkan bahwa program KB telah diterapkan dengan baik dan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Data dari tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan peningkatan jumlah pengguna KB, dengan pencapaian yang cukup signifikan meskipun belum sepenuhnya sesuai target yang diinginkan. Wawancara lebih lanjut dengan pejabat lainnya, seperti Kepala Bidang KB dan Reproduksi dr. Meyvi Johana Tuegeh, M.Kes, dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Masye Sofie Mekel, SE, menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya, persentase laju pertumbuhan penduduk menurun. Hal ini menegaskan efektivitas program KB dalam pengendalian populasi di Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam pelaksanaan program, terdapat koordinasi antara Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dengan Dinas Kesehatan kabupaten terkait distribusi alat kontrasepsi. Data menunjukkan peningkatan penggunaan KB dari tahun ke tahun, meskipun ada ketidaksesuaian dalam realisasi anggaran yang menunjukkan adanya kendala dalam perencanaan dan penyerapan dana secara optimal. Dari segi anggaran, terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Meskipun demikian, dana yang tidak terserap akan disalurkan ke SILPA untuk digunakan pada inisiatif yang sama di tahun anggaran berikutnya. Anggaran dan realisasi dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan bahwa penurunan anggaran pada tahun 2021 disebabkan oleh rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19, yang mempengaruhi beberapa pelayanan.



Secara keseluruhan, program KB di Kabupaten Minahasa Utara telah menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Program ini perlu terus dilaksanakan dan dievaluasi untuk mencapai tujuan dan target yang lebih optimal.

### **3.1.2 Kelemahan (*Weakness*)**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Minahasa Utara memegang peran penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, namun masih dihadapkan pada berbagai kelemahan yang menghambat efektifitas program tersebut. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat, seperti Kepala Bidang KB dan Reproduksi, dr. Meyvi Johana Tuegeh, M.Kes, dan Sekretaris Dinas PPKB, dr. Debby Montung, M.Kes, terungkap bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, serta kekurangan sumber daya manusia yang terampil.

Kendala dalam penyaluran alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan menjadi hambatan signifikan. Dinas PPKB memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk program KB, namun seringkali menghadapi kesulitan karena keterbatasan alat transportasi. Data sarana prasarana menunjukkan bahwa dari 317 item yang dimiliki, 95 item berada dalam kondisi rusak berat, termasuk generator, printer, dan komputer yang krusial untuk mendukung kinerja dinas.

Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Dengan hanya 22 pegawai, termasuk kepala dinas dan staf lainnya, pelaksanaan program KB menjadi kurang optimal. Tiap bidang hanya memiliki rata-rata lima orang pegawai, yang tidak mencukupi untuk menjalankan tugas-tugas distribusi, pemantauan, dan pengendalian program di berbagai fasilitas kesehatan. Wawancara dengan Ibu Masye Sofie Mekel, SE, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, menggarisbawahi bahwa kekurangan tenaga kerja di bidang pengendalian penduduk, advokasi, pergerakan, dan informasi semakin memperburuk situasi.

Kekurangan alat transportasi dan sarana prasarana memadai, serta jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas, menjadi kelemahan utama dalam pelaksanaan program KB di Kabupaten Minahasa Utara. Kelemahan-kelemahan ini berdampak pada efektivitas Dinas PPKB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan mengoptimalkan pencapaian target program. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan fasilitas, pengadaan sarana prasarana baru, serta penambahan dan pelatihan tenaga kerja yang memadai agar program KB dapat dilaksanakan secara optimal dan tujuan pengendalian pertumbuhan penduduk tercapai.

### **3.1.3 Peluang (*Opportunity*)**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Minahasa Utara memiliki sejumlah peluang strategis dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, yang diperoleh melalui dukungan kebijakan dan regulasi yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas PPKB, Dr. Jane M.S. Symons, M.Kes, terungkap bahwa keberadaan peraturan pemerintah dan regulasi lokal, seperti Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas PPKB, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program KB.

Dukungan dari pemerintah pusat menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap program Keluarga Berencana, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengendalian pertumbuhan penduduk. Tingkat kepedulian ini tercermin dalam berbagai inisiatif dan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas layanan KB. Peluang ini memungkinkan Dinas PPKB untuk menyusun dan menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan program KB.

Selain itu, adanya regulasi yang jelas dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah menciptakan peluang untuk memperluas cakupan layanan, meningkatkan aksesibilitas program KB, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ini juga membuka jalan bagi kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan organisasi masyarakat, untuk mencapai tujuan pengendalian pertumbuhan penduduk secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Peluang strategis ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas PPKB untuk terus melakukan inovasi dalam program KB, memperbaiki infrastruktur dan sarana prasarana, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, program KB di Kabupaten Minahasa Utara dapat dilaksanakan dengan lebih baik, mencapai target yang diinginkan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

#### **3.1.4. Ancaman (*Threats*)**

Dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) menghadapi sejumlah ancaman eksternal yang dapat menghambat efektivitas program mereka. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat kunci di Dinas PPKB, beberapa tantangan telah diidentifikasi. Salah satu ancaman utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Ibu dr. Jane M. S. Symons, M.Kes, Kepala Dinas PPKB, menekankan bahwa organisasi ini masih sangat kekurangan tenaga profesional yang memiliki keahlian yang diperlukan. Meskipun dia terus berusaha memotivasi dan menginspirasi anggota timnya untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan integritas dan memberikan pelayanan terbaik, keterbatasan jumlah pegawai yang berkualitas tetap menjadi hambatan besar. Hal ini mengakibatkan beban kerja yang tidak seimbang dengan luas wilayah yang harus dilayani dan kompleksitas tugas yang harus diselesaikan.

Selain itu, partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan pria, dalam program Keluarga Berencana masih sangat rendah. Ibu dr. Debby Montung, M.Kes, Sekretaris Dinas PPKB, menjelaskan bahwa banyak pria enggan berpartisipasi dalam program KB, terutama dalam penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dan metode operasi pria (MOP). Kekhawatiran akan dampak negatif terhadap kejantanan, impotensi, rasa malu, dan stigma sosial menjadi alasan utama rendahnya partisipasi pria. Hal ini menjadi hambatan besar dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk karena peran serta pria sangat penting dalam keberhasilan program KB.

Kepala Seksi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, Ibu Erna Roringpandey, Amd.Keb, menambahkan bahwa kekhawatiran pria terhadap vasektomi sangat dominan. Banyak pria merasa bahwa melakukan vasektomi akan mengurangi kejantanan mereka dan mereka malu karena bisa menjadi bahan pembicaraan negatif di lingkungan sosial mereka. Untuk mengatasi masalah ini, telah dibentuk paguyuban pria melalui grup WhatsApp yang beranggotakan pria-pria yang telah melakukan vasektomi. Grup ini berfungsi sebagai wadah untuk bertukar informasi, memberikan testimoni, dan berbagi pengalaman, sehingga dapat membantu mengurangi kekhawatiran dan stigma yang ada.



Selanjutnya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Ibu Masye Sofie Mekel, SE, menjelaskan bahwa pemikiran masyarakat yang masih terkotak-kotak bahwa program KB hanya untuk wanita menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, upaya sosialisasi terus dilakukan melalui berbagai momentum, seperti Hari Keluarga Nasional, Hari Kontrasepsi Internasional, dan Hari Kartini, serta bekerja sama dengan instansi lain untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pria dalam program KB.

Dengan demikian, ancaman yang dihadapi oleh Dinas PPKB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara meliputi kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dan rendahnya partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana. Kedua hal ini memerlukan upaya strategis dan kolaboratif untuk diatasi, sehingga program KB dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

### **3.2. Faktor Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Minahasa Utara**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Minahasa Utara menghadapi berbagai kelemahan dalam upayanya menekan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat kunci di dinas tersebut, ditemukan bahwa terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Meskipun dinas memiliki otoritas yang kuat dan peran yang signifikan, tantangan ini menghambat efektivitas program Keluarga Berencana (KB). Menurut Ibu Dr. Meyvi Johana Tuegeh, M.Kes, Kepala Bidang KB dan Reproduksi, dinas bertindak sebagai penyedia utama dalam program KB dengan mengalokasikan kontrasepsi ke berbagai fasilitas kesehatan serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program. Namun, keterbatasan alat transportasi sering kali menghambat pelaksanaan program ini, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Data menunjukkan bahwa dari total 317 item peralatan yang dimiliki, 95 di antaranya mengalami kerusakan berat, termasuk generator, printer, PC, dan laptop yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dinas. Selain itu, kekurangan tenaga kerja juga menjadi hambatan signifikan. Dinas PPKB memiliki hanya 22 pegawai, yang jumlahnya tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Menurut Ibu dr. Debby Montung, M.Kes, Sekretaris Dinas PPKB, jumlah sumber daya manusia yang terbatas ini membuat pelaksanaan program KB menjadi kurang optimal.

Partisipasi masyarakat, terutama dari kalangan pria, dalam program KB juga sangat rendah. Ini disebabkan oleh kekhawatiran pria terhadap metode kontrasepsi seperti vasektomi, yang dianggap dapat mengurangi kejantanan dan menyebabkan impotensi. Untuk mengatasi masalah ini, dinas telah membentuk paguyuban pria melalui grup WhatsApp yang beranggotakan pria-pria yang telah melakukan vasektomi, sebagai wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman.

Selain itu, persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa program KB hanya untuk wanita juga menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, dinas terus melakukan sosialisasi melalui berbagai momentum seperti Hari Keluarga Nasional dan Hari Kontrasepsi Internasional, bekerja sama dengan instansi lain untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pria dalam program KB.

Dari kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas PPKB Kabupaten Minahasa Utara menghadapi tantangan besar dalam hal sumber daya manusia yang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, rendahnya partisipasi pria dan persepsi

masyarakat yang keliru mengenai program KB menjadi hambatan signifikan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasi tantangan ini, dinas perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki dan mengganti peralatan yang rusak, serta terus melakukan sosialisasi yang intensif untuk mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan partisipasi pria dalam program KB.

### 3.3. Tahapan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Analisis SWOT

Berdasarkan evaluasi SWOT, terdapat potensi untuk merumuskan strategi melalui kombinasi EFAS (Eksternal Strategic Factor Analysis Summary) dan IFAS (Internal Factor Analysis Summary). Analisis ini memungkinkan pengidentifikasian berbagai opsi strategis yang dapat diadopsi. Selain itu, peneliti juga melakukan formulasi arah strategi menggunakan matriks SWOT sebagai panduan. Terdapat rincian terhadap analisis yang digunakan adalah:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*) yang terdiri dari
  - a. Mengoptimalkan pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) melalui partisipasi aktif setiap masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, dengan menggunakan sumber daya anggaran yang tersedia secara optimal.
  - b. Memanfaatkan kerangka hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati terkait
2. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)
  - a. Tindakan diupayakan untuk mengatasi defisit dalam jumlah dan kualifikasi staf dengan mengajukan usulan untuk peningkatan sumber daya manusia kepada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka melakukan Program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Minahasa Utara.
  - b. Dengan mempergunakan kesadaran administratif pemerintah, permintaan diajukan untuk menambahkan sarana prasarana yang kurang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mendukung program KB yang dijalankan oleh Dinas.
3. Strategi ST (*Strength-Threat*)
  - a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan melalui upaya penyuluhan kepada publik tentang pentingnya melakukan KB dalam berkeluarga demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
  - b. Meningkatkan fungsi dan tanggung jawab dinas sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Strategi WT (*Weakness-Threat*)
  - a. Meningkatkan tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan perannya dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat.
  - b. Tindakan untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur seperti mobil pelayanan KB, serta penyediaan pelatihan kepada karyawan, bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas dengan efisiensi yang lebih baik.
  - c. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan Program KB dan pemahaman mengenai fungsinya dapat ditingkatkan.



Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi seperti pada proses pengamatan lingkungan sebelumnya maka dapat dibuat alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 1**  
**Matriks SWOT Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara**

| <b>Internal Factors (IFAS)</b>   | <b>Kekuatan (Strength)</b>   | <b>Kelemahan (Weakness)</b>  |
|--|--|--|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya program khusus yang dijalankan yaitu Program Keluarga Berencana dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk</li> <li>Disediakannya alokasi anggaran yang khusus untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana</li> <li>Adanya tenaga honorer bantuan .</li> </ol>   |
| <b>External Factors (EFAS)</b>   | <b>Strategi S-O</b>  | <b>Strategi W-O</b>  |
| <b>Peluang (Opportunities)</b>   |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah pusat dan daerah menunjukkan tingkat kepedulian yang signifikan terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara</li> <li>Adanya Ragulasi dan dasar hukum yang jelas Terdapat entitas lain yang memiliki kewenangan, seperti Kepala Desa dan Lurah, yang secara aktif mendukung proses program KB di kabupaten Minahasa Utara</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan program KB yang mencakup serangkaian kegiatan di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa Utara, dengan menggunakan dana sehemat mungkin agar dapat memperoleh hasil yang optimal. (O2 + S2)</li> <li>Memfaatkan regulasi perundang-undangan serta ketetapan Bupati yang relevan terkait tugas dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dalam mengatur jumlah pertumbuhan penduduk di tiap tahunnya (O3 + S1)</li> <li>Peningkatan kemampuan dan kerjasama dengan tenaga bantuan melakukan tugas Program KB (S3 + O3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan memanfaatkan perhatian dari pemerintah, diajukanlah permohonan untuk peningkatan sarana dan prasarana DPPKB. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses penyuluhan program KB di tempat yang jauh (O1+ W1)</li> <li>Memperkuat kesadaran serta kewajiban pegawai terhadap tugas dan perannya dalam menggalang kerja sama dengan entitas. (W2 + O3)</li> <li>Memfaatkan kepedulian pemerintah pusat agar dapat memenuhi standar operasional. (O1 + W3)</li> </ol> |
| <b>Ancaman (Threat)</b>  | <b>Strategi S-T</b>  | <b>Strategi W-T</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat akan pentingnya program Keluarga Berencana dalam kehidupan bermasyarakat</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan sumber daya finansial yang tersedia untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang program KB dalam berkeluarga agar tidak terjadinya pemadatan penduduk atau laju pertumbuhan yang tidak stabil. (S2 + T2)</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Program KB di keluarga (T1 + W2)</li> <li>Menyampaikan usulan untuk menambahkan fasilitas dan infrastruktur seperti mobil pelayanan</li> </ol>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>KB berjalan dan barang barang di dalam Dinas yang sudah kurang memadai.</p> <p>3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan akan kepemilikan KB agar dapat berguna untuk keluarga sendiri maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.(T1+ W1)</p> |
|--|--|---|

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024)

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Selama melaksanakan penelitian penulis telah menemukan yang bisa dijadikan diskusi terhadap perbandingan terhadap penelitian terdahulu, dimana temuan penelitian penulis adalah strategi dalam bentuk program yaitu Program KB kemudian mengimplementasikannya yang berjalan dengan cukup baik meskipun ada berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan program ini seperti sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdurrahman, M. Taufik Rachman, dan Dara Puspita Ayu yang menunjukkan bahwa, pelaksanaan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota mataram sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi atau program yang dilaksanakan (Abdurrahman et al., 2019). Kemudian penelitian, Desrita Sari dan Hasim As'ari yang menunjukkan bahwa, strategi ini Dari semua indicator evaluasi strategi, bisa dikatakan strategi ini berhasil, karna bisa dilihat dari cara kerja serta hasil dari program strategi pengendalian penduduk tersebut. Dalam menjalankan startegi terdapat kendala yang dihadapi seperti kekurangan sumber daya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat (Sari & As, 2023).

## IV. KESIMPULAN

Penelitian mengenai strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, melalui observasi dan wawancara, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Faktor internal meliputi kekuatan seperti dasar hukum yang jelas, alokasi anggaran pemerintah, dan dukungan dari tenaga honorer, serta kelemahan seperti kurangnya fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan kesadaran pegawai terhadap tugas. Faktor eksternal mencakup peluang dari implementasi program Keluarga Berencana (KB) dan ancaman seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan tantangan geografis.

Strategi prioritas merupakan metode penting dalam pelaksanaan kebijakan, yang bertujuan mengidentifikasi dan menangani kekurangan serta ancaman dalam program KB. Langkah-langkahnya meliputi pengoptimalan program KB, pemanfaatan dasar hukum, peningkatan kapasitas dan kerjasama dengan tenaga bantuan, serta peningkatan koordinasi efektif. Motivasi dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan serta sosialisasi yang berkelanjutan dan pengadaan transportasi juga dianggap penting.

Diharapkan strategi ini akan meningkatkan efektivitas program KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Saran yang diberikan meliputi pemaksimalan faktor kekuatan internal,



penyelesaian kekurangan infrastruktur, peningkatan komitmen pegawai, optimalisasi peluang eksternal, pelaksanaan strategi prioritas, evaluasi dan koordinasi rutin, serta pelatihan berkala bagi pegawai untuk mengembangkan kompetensi dan motivasi melalui sistem reward dan punishment.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanggulangan laju pertumbuhan penduduk agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Rachman, M. T., & Ayu, D. P. (2019). Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 152. file:///C:/Users/dd d/Downloads/1272-3449-1-SM (1).pdf
- Adiwilaga, R., & Alfian, Y. (2021). Analisis Swot Pada Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (Dp2Kbp3a) Di Kabupaten Bandung Tahun 2018. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 27–41. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1561>
- Amelinda, A. C., & Haryani, T. N. (2023). Efektivitas Program Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Srikandi Gilingan, Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(2), 436–447.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Catalog : 1101001. *Statistik Indonesia 2020*, 1101001, 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- BKKBN. (2023). *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. <https://www.bkkbn.go.id/>
- Dinas PKKB Minahasa Utara. (2023). *Satu Data Minahasa Utara*. <https://satudata.minut.go.id/>
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 510–517.
- Gerits, G. N. ., Sambiran, S., & Sampe, S. (2022). Strategi Pemerintah Kota Bitung Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Matuari (Studi Di Dinas Pengendalian Dan Keluarga Berencana Kota Bitung ). *Governance*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.1093/oed/7479512738>

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(2), 88–99. <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i2.2801>
- R, R. A., Ramlan, & Rusman, A. D. P. (2020). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Guna Mewujudkan Keluarga Kecil Mandiri Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), 329–340. <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.309>
- Rangkuti, F. (2008). *Analisis swot teknik membedah kasus bisnis : reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, D., & As, H. (2023). Evaluasi Strategi Pengendalian Penduduk di Kota Pekanbaru. *Innovative*, 3, 10898–10909.
- Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, D. H., Samin, R., & Okparizan. (2023). Evaluasi program penanggulangan gizi buruk pada balita di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan keluarga berencana Kota Tanjungpinang. *Dokrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 116–128.
- Utara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa. (2021). *Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2021*.
- Utara, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2023). *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2023*.

